



Triwulan I
2025

Laporan Kinerja BBRSEKP



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

2025



Triwulan I
2025

Laporan Kinerja BBRSEKP



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2025

TIM PENYUSUN

Pembina

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

(Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si)

Penanggung Jawab

Ketua Kelompok Pengelolaan Kinerja

(Fenni Eddrisea, M.Si)

Anggota

Edwin Yulia Setyawan, S.T

Nurma Yunita D, S.E

Dedi Prayitno, S.Kom

Kontributor

Kepala Sub Bagian Umum

Kelompok Kerja Perencanaan

Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

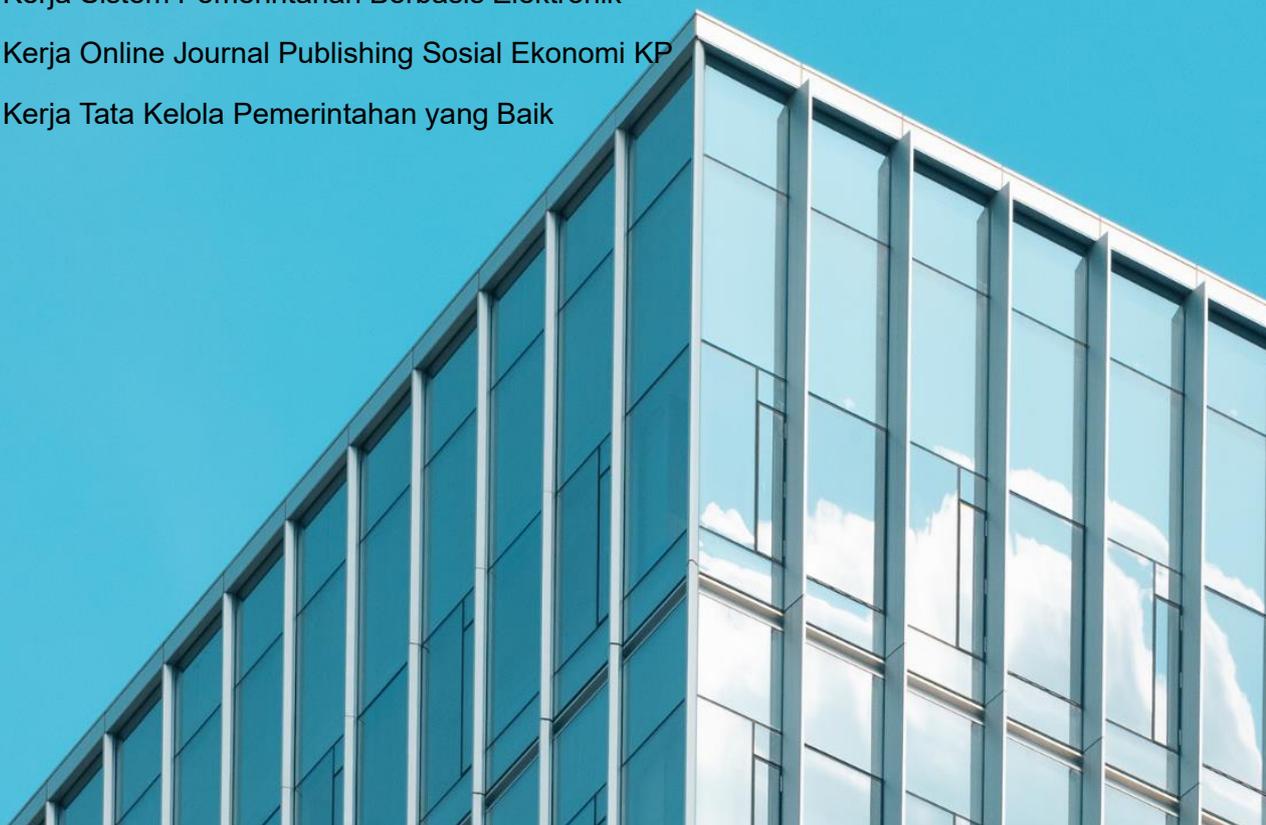
Kelompok Kerja Penyelenggaran Sistem Manajemen SDMA

Kelompok Kerja Public Sharing Sosial Ekonomi KP

Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Online Journal Publishing Sosial Ekonomi KP

Kelompok Kerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-NYA sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) triwulan I tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BBRSEKP selama periode triwulan I tahun 2025, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

BBRSEKP triwulan I tahun 2025 mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian selama periode triwulan I tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRSEKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Kinerja BBRSEKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja (IK) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP tahun 2025 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pelaksanaan tugas serta bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRSEKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja BBRSEKP selama triwulan I tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini juga memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, 21 April 2025

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan



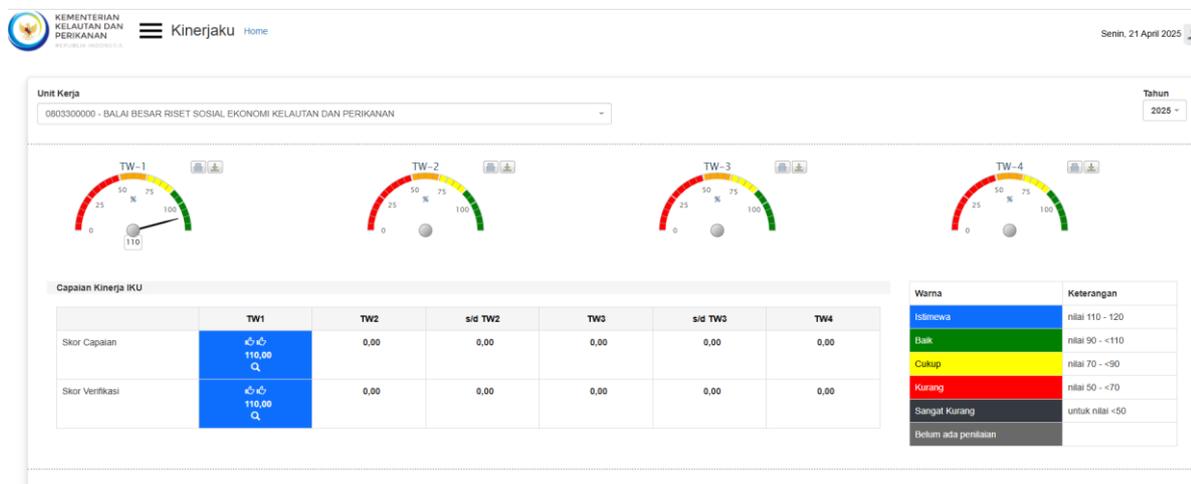
Dr. Novi Susetyo Adi, S.T., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRSEKP sepanjang triwulan I tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, mengelola keuangan, dan implementasikan SAKIP di lingkungan BBRSEKP pada tahun 2025.

Pada triwulan I tahun 2025, BBRSEKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai pada akhir tahun dengan dukungan anggaran Rp.10.763.682.000 guna mencapai target - target yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 10 (dua puluh) Indikator Kinerja (IK). Hasil pengukuran kinerja dari aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2025 sebesar **110,00 %** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP TW I Tahun 2025



Selama triwulan I tahun 2025 dari 10 IK BBRSEKP, terdapat 1 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 1 IK berstatus baik (hijau). Rincian target dan realisasi 2 IK tersebut adalah:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 85% atau sama dengan 100%;
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja triwulan I tahun 2025, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama triwulan I tahun 2025 sebesar Rp2.060.989.758 relatif rendah dari pagu anggaran Rp10.763.682.000 hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran serta blokir dja. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 19.15% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari tiga SK tercapai melebihi target atau **"ISTIMEWA"**, yaitu SK "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker" dengan persentase capaian 110%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Yang Baik

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu melalui verifikasi dan validasi capaian kinerja dengan tim penilai BPPSDMKP.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Tahun. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Capaian 2025	% Capaian
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2	-	-
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1	-	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76	-	-
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	-	-
		5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	-	-
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50	-	-
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82	-	-
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	-	-

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan SDM	5
1.5. Potensi dan Permasalahan	6
1.6. Sistematika Laporan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan	15
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Pengukuran Kinerja	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
3.3. Realisasi Keuangan	34
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran	36
Bab IV Penutup	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	39
Lampiran	
- Perjanjian Kinerja	
- Penghargaan BBRSEKP	

Daftar Tabel

1	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun. 2025	Viii
2	Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025	15
3	Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2025	15
4	Capaian Kerja BBRSEKP Tahun 2025	19
5	Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN	22
6	Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN	23
7	Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN	23
8	Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN	23
9	Capaian IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	29
10	Perbandingan Capaian IK 8 K/L BBRSEKP Dengan BBRP2BKP	30
11	Capaian IK 9 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	32
12	Perbandingan Capaian IK 9 K/L BBRSEKP Dengan BBRP2BKP	32
13	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja TW I Tahun 2025	34
14	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Triwulan I Tahun 2025	35
15	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK TW I Tahun 2025	35
16	Rincian Target Dan Realisasi Atas 10 IK TW I Tahun 2025	39

Daftar Gambar

1	Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	V
2	Struktur Organisasi BBRSEKP	4
3	Rincian PNS BBRSEKP	5
4	Komposisi Pegawai BBRSEKP	5
5	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2025-2029	13
6	Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2025	13
7	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1	21
8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2	22
9	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3	24
10	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4	25
11	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5	26
12	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6	27
13	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7	28
14	Data Rekapitulasi Capaian IK 8 sesuai surat BPPSDMKP	30
15	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8	31
16	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9	33
17	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 10	34
18	Capaian Kinerja pada <i>Dashboard</i> Kinerja BBRSEKP TW I Tahun 2025	38



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Tugas Dan Fungsi

1.4 Keragaan SDM

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.6 Sistematika Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan disebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Bentuk implementasi tugas dan fungsi BBRSEKP melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan didukung operasional kegiatan manajerial serta sarana dan prasarana. Ketiga Kegiatan tersebut menjadi komponen rencana kegiatan satker yang memiliki target output atau keluaran pada setiap tahunnya. Output yang dihasilkan merupakan indikator keberhasilan dari BBRSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2024, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj BBRSEKP Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban BBRSEKP.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TA. 2024, berupa output dukungan manajemen satker. Target output tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BBRSEKP dan secara detail tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP dengan alokasi anggaran Rp. 10.763.682.000,- dengan DIPA Petikan Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (403836) Nomor : SP DIPA - 032.12.2.403836/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan kode digital stamp DS:DS:1338-3733-6610-9687 (Revisi 02).

Gambaran akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2025 serta keluaran atau output apa saja yang telah dihasilkan BBRSEKP dituangkan dalam laporan kinerja ini. Meskipun laporan kinerja triwulan I tahun 2025 lebih banyak menginformasikan kegiatan manajerial, berkenaan dengan masih belum ditetapkannya organisasi baru pasca tugas riset yang disatukan kedalam BRIN, namun tetap disusun sesuai kaidah aturan yang berlaku untuk dapat diketahui dan menjadi informasi bagi stakeholder terkait dan masyarakat luas.

Adapun dasar hukum penyusunan LKJ BBRSEKP triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
3. Sebagai umpan balik (*Feed back*) untuk perbaikan kinerja triwulan di tahun berikut

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas ***melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

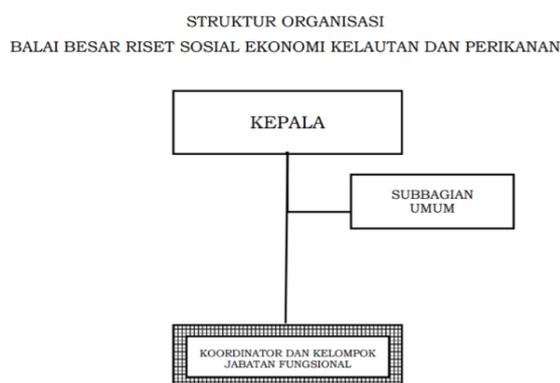
Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

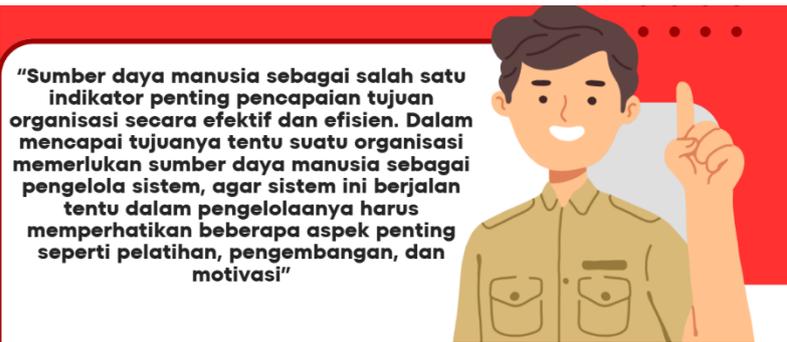
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 2 . Struktur Organisasi BBRSEKP

1.4 Keragaan SDM



Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sampai dengan bulan desember ber jumlah 56 orang, terbagi dalam 5 (lima) yaitu SDM Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, P3K, PPNPN serta Tenaga *Outsourcing*. Pada tahun 2024, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Komposisi dari pegawai yang berada di BBRSEKP, sebagai berikut :



Gambar 3 . Rincian PNS BBRSEKP



Gambar 4 . Komposisi Pegawai BBRSEKP

1.5 Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kelembagaan Riset.

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BPPSDM KP. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan ini dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan karena tugas dan fungsi riset berpindah ke BRIN. Dampaknya pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah program dan kegiatan terkait riset sudah tidak dapat dilaksanakan.

Program riset pada BBRSEKP bertransformasi menjadi kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditanggungjawab oleh Tim Kerja Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi (Ansos), yang mana hal ini merupakan eksekusi dari perubahan organisasi yang sangat dinamis. Kegiatan yang dilakukan secara fungsi masih berupa kegiatan yang mendukung program kegiatan di lingkup eselon I kementerian, merupakan kegiatan menganalisa suatu topik atau rencana program dan memberikan rekomendasinya. Tim kerja

ini melakukan kegiatan yang mendukung seluruh program BPPSDMKP dan program prioritas KKP, namun demikian sesuai dengan mandat prepres nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN perlu dilakukan perubahan sotr yang dapat mendukung tugas dan fungsi pada BBRSEKP setelah tidak lagi memiliki tugas dan fungsi terkait dengan riset.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) yang pernah di ikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 , meski jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah S1 relatif kecil, yaitu sejumlah 1 orang (1,75%), namun kontribusi pegawai dimaksud dibutuhkan untuk menjalankan fungsi BBRSEKP dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 mempunyai tren yang menurun dibandingkan tahun 2021, karena adanya mutasi pegawai BBRSEKP ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 maupun ke eselon I lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRSEKP pada dari 2025 berkurang sebesar 5% dibandingkan pada tahun 2024.

Terlepas dari kebijakan organisasi riset yang sedang dialami saat ini, BBRSEKP masih menghadapi beberapa tantangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi kedepan, antara lain:

1. Laboratorium sosial ekonomi belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan spesifikasi sehingga membutuhkan anggaran untuk mengembangkan laboratorium sesuai standar dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
2. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM fungsional perencana, pranata komputer, statistisi untuk meningkatkan keahlian terkait data analisis, programmer, desain grafis, *full-stack developer*, dll;
3. Sarana dan prasarana fisik perpustakaan belum sesuai standar perpustakaan;
4. Kondisi dan ketersediaan alat pengolah data yang sudah tidak up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini;
5. Jumlah ruangan pertemuan yang masih terbatas, kondisi saat ini ketersediaan ruang pertemuan digunakan bersama oleh beberapa satuan kerja yang masing-masing mempunyai frekuensi pertemuan yang tinggi.

2) Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional menyatukan kegiatan riset yang menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan 3 Tahun 2022 sampai dengan saat ini selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset pada tahun 2022-2025 ini hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja dukungan manajerial.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) triwulan I tahun 2025 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Cover Laporan

2. **Kata Pengantar**, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BBRSEKP.

3. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .

4. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran umum tentang organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai dan organisasi serta potensi dan permasalahan.

5. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realiasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
- e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja; dan

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan (BBRSEKP) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BBRSEKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pelatihan Dan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan (BPPSMKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BRSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2025 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”



Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai **Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan** adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengingkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

B. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BPPSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

Misi ke-1 yakni “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (*science based policy*);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
4. Menghasilkan *big data* sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien.

D. Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. BPPSDMKP tahun 2021 – 2024 menetapkan lima sasaran program yang mengacu pada sasaran strategis KKP, yaitu:

SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

SP-2 Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat;

SP-3 Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

SP-4 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP.

Sebagai unit kerja Eselon II, BBRSEKP melaksanakan kegiatan yang di *cascading* dari sasaran strategis (SP) BPPSDMKP menjadi sasaran kegiatan (SK) BBRSEKP yaitu **SP-2, SP-3 dan SP-4** diturunkan menjadi SK -1, SK-2 dan SK-3 sebagai sasaran kegiatan yang harus dicapai yaitu:

SK-1 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;

SK-2 Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan

SK-3 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker.

Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2025-2029



Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025

Berdasarkan uraian sebelumnya peta strategis kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BBRSEKP pada Tahun 2024 seperti pada Gambar dibawah ini :



Gambar 6. Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2025

Metode pengukuran capaian sasaran kegiatan tersebut dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) atau *Key Performance Indicator*, disingkat KPI pada masing - masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitupada <http://Kinerjaku.kkp.go.id> dengan pengukuran 2 strategis kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke satu (SK- 1) yang akan dicapai adalah **“Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan”** dengan Indikator Kinerja :

1. Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) sebanyak 2 Paket

b) Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” dengan Indikator Kinerja:

1. Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan) sebanyak 1 Laporan

c) Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-3) yang akan dicapai adalah “ Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” dengan Indikator Kinerja:

1. Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks) pada tahun 2025 senilai 76;
2. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 85;
3. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 92;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 71,50;
5. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 82;
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada tahun 2025 sebesar 85%;
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) pada tahun 2025 sebesar 80%;
8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%) sebesar 80%.

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000) Awal
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	76.000
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	37.682
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10.650
Total Anggaran Tahun 2024		10.763.682

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBRSEKP level 2 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2025 kementerian dan program BPPSDMKP. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2025 BBRSEKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan ditandatangani oleh Kepala BPPSDMKP Bersama dengan Kepala BBRSEKP pada tanggal 24 Januari 2025.

Seiring berjalannya kegiatan terdapat perubahan atau revisi Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diantaranya:

1. Nomor B.543/BBRSEKP/TU.210/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025 , perubahan tersebut hanya terkait pejabat penandatanganan PK dimana semuala Dr. Rita Tisiana Dwi Kuswardani menjadi Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si sebagai Kepala BBRSEKP terbaru.

Adapun Indikator Kinerja tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan	1 Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2

	Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Metode pengukuran kinerja pada BBRSEKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dilakukan oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BBRSEKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP Nomor: 15/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja terdiri dari seluruh Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan staf dan tim sekretariat. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi per triwulan yang dihadiri penanggung jawab dan Tim Pengelola Kinerja. Hasil pemantauan dan pengukuran diinput kedalam aplikasi Kinerjaku untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh sekretariat BPPSDMKP.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP TW I Tahun 2025**
- 3.2. Evaluasi Dan Analisis Kinerja**
- 3.3. Realisasi Keuangan**
- 3.4. Analisis Efisiensi Anggaran**

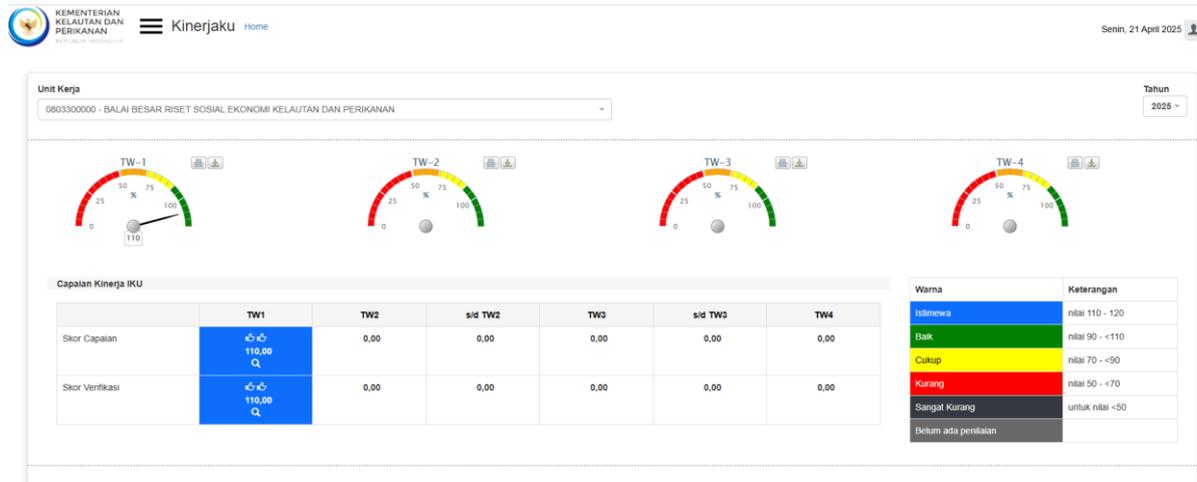


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2025, BBRSEKP telah menetapkan 10 (Sepuluh) IK, dimana realisasi sampai dengan triwulan I menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **110,00% (Istimewa)** (Gambar 2). Uraian rincian dari hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan pada bagian selanjutnya bab III.



Keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena faktor pengawalan monitoring dan evaluasi kegiatan pada BBRSEKP yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Terutama ketika mengalami perlambatan karena adanya perubahan transformasi struktur organisasi menjadi fungsional dan menunggu terbitnya SOTK organisasi baru belum sepenuhnya yang mana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sangat efektif mengawal agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan. Upaya pemantauan menghasilkan beberapa upaya dan langkah antisipatif agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dengan melakukan beberapa perubahan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan pada BBRSEKP. Kegiatan pengelolaan kinerja dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BBRSEKP Nomor: 20/BBRSEKP /IV/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Tahun 2025.

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK online juga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui website <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Pengisian aplikasi kinerjaku oleh BBRSEKP setelah pelaksanaan pemantauan rutin terhadap perkembangan capaian melalui kegiatan monev rencana aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target IK yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulan beserta kendala yang dihadapi Pemantauan secara periodik dilakukan sebagai Langkah antisipatif dan

preventif terhadap indikator yang memiliki risiko tinggi untuk dicapai atau mungkin tidak dapat mencapai target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis kinerja juga dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja triwulan I tahun 2025 dengan kinerja triwulan I tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja BBRSEKP triwulan I tahun 2025 menurut penetapan tiga sasaran kegiatan. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BBRSEKP yang disusun pada bulan April 2025 (revisi) saat ini memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu SK-1. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, SK-2 Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta SK-3 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker dan Satker memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja.

Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2025. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Capaian Kerja BBRSEKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2	-	-
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2 Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1	-	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta	3 Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76	-	-
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	-	-
		5 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	-	-
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50	-	-

Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai	82	-	-
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100
	9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120
	10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	-	-

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1.

Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)

IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) merupakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sektor kelautan dan perikanan yang diperkenalkan dan diterapkan melalui program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut, memperkenalkan teknik-teknik baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa Rekomendasi kebijakan model proses bisnis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat yang mencakup pengembangan kapasitas, pemanfaatan teknologi/digital, penguatan kelembagaan dan akses pendanaan yang ditanda tangani kepala BPPSDMKP.

Capaian IK pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur karena target di tetapkan di akhir tahun. Kegiatan saat ini masih dalam blokir, sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan belum dapat dilakukan karena adanya kebijakan blokir dari DJA.

Adapun progress kegiatan sampai dengan TW I adalah koordinasi internal tim pelaksana kegiatan dalam menyiapkan draft dokumen kerangka acuan kegiatan, serta menunggu arahan BPPSDMKP lebih lanjut terkait dengan blokir kegiatan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan “Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan” dengan pagu anggaran sebesar Rp76.000.000 dan belum terdapat realisasi anggaran karena adanya kebijakan efisiensi.



Ket : diskusi penyiapan draft kerangka acuan kerja kegiatan

Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 2.

Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)

IK Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan) merupakan Hasil pemberdayaan masyarakat adalah perubahan positif yang terjadi pada individu, kelompok, atau komunitas setelah mengikuti program atau kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi seperti pelatihan, pendampingan, serta penguatan akses dan sumber daya

Tujuannya adalah perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, dengan peningkatan kemandirian dan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Capaian IK pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur karena target di tetapkan di akhir tahun. Kegiatan saat ini masih dalam blokir, sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan belum dapat dilakukan karena adanya kebijakan blokir dari DJA.

Adapun progress kegiatan sampai dengan TW I adalah koordinasi internal tim pelaksana kegiatan dalam penyiapan draft dokumen kerangka acuan kegiatan, serta menunggu arahan BPPSDMKP lebih lanjut terkait dengan blokir kegiatan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan “Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat” dengan pagu anggaran sebesar Rp37.682.000 dan belum terdapat realisasi anggaran karena adanya kebijakan efisiensi.



Ket : diskusi penyiapan draft kerangka acuan kerja kegiatan

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 3

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja 2.

Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)

IK Indeks profesionalitas ASN BBRSEKP merupakan indikator yang dibentuk dari

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018)
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5. Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
1	Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
			DIII	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
			S2	25	20	15	10	5	1
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10		

Tabel 6. Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DI IKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/KONFRENSI/SARASEHAN/WORKSHOP/LOKAKARYA/SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	15	Proposional	17,5	-

Tabel 7. Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel 8. Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
c. Berat	1		

Capaian IK 3 Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur di triwulan berikutnya, atau semester I.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

1. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh instansi baik lingkup KKP maupun K/L lainnya;
2. Menyusun dan/ atau melakukan upload file ke dalam tautan yang telah ditentukan terkait kualifikasi, kompetensi dan disiplin pegawai;
3. Berkoordinasi dengan Biro SDMAO terkait kualifikasi pendidikan IP ASN.
4. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen SDM” dengan pagu anggaran sebesar Rp70.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 10 % atau sama dengan Rp7.790.000.



Ket : Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Bangkom ASN dan Penghitungan Formasi Kebutuhannya



Ket : Koordinasi dan Konsultasi dengan biro SDMAO KKP

Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3

Indikator Kinerja 3.

Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Keterbukaan informasi suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan
- Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi.

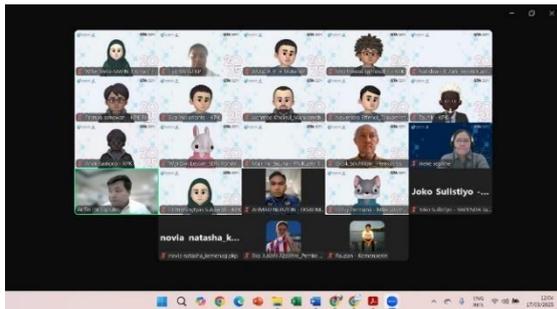
Capaian IK 4 Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur di akhir tahun kegiatan.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

1. Penyebarluasan konten Nilai-nilai penghargaan kapal Pinisi melalui media sosial BBRSEKP;
2. Rapat Inovasi Pelayanan Publik Inovasi Yanblik 2025 melalui daring;
3. Penyusunan strategi kehumasan tahun 2025.
4. Melakukan pelayanan jurnal melalui Whatsapp dan Gmail
5. Mengelola sirkulasi naskah buletin ilmiah marina kepada Copy Editor;
6. Melayani permohonan softfile buku (sketsa kampung nelayan dan jejak inspiratif) yang diminta oleh pemohon;

7. Berkoordinasi dengan Tim Humas Sekretariat BPPSDMKP terkait dengan penilaian keterbukaan informasi

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui dua kegiatan Manajerial “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta Layanan Data dan Informasi” dengan total pagu anggaran sebesar Rp85.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 22 % atau sama dengan Rp18.694.000.



Ket : Webinar pelatihan AI Artificial Intelligence for Government Content Creation



Ket : Pelayanan Jurna BBRSEKP

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4

Indikator Kinerja 5.

Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)

Nilai IKPA BBRSEKP merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

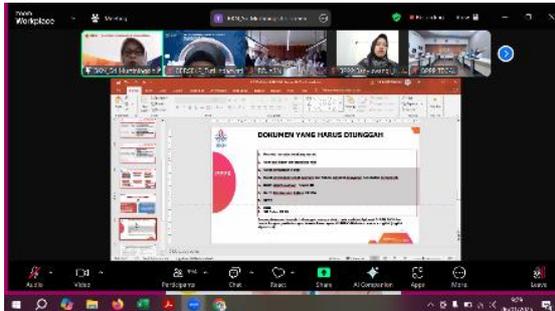
Capaian IK 5 Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur di triwulan berikutnya atau semester I tahun 2025.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

1. Revolving GUP dan mengajukan Pembuatan SPP dan SPM Ke KPPN;
2. Pembayaran gaji an tunjangan periode jan-maret 2025;
3. Input aplikasi omspan dan sakti keuangan;
4. Melakukan Pembukuan Input Transaksi Pembayaran GUP KKP di Aplikasi Sakti;
5. Penyusunan laporan SPIP;
6. Penyusunan laporan triwulan I tahun 2025;

7. Melakukan Revisi Pemutakhiran KPA terkait Gaji PPNPN dan PJLP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perkantoran” dengan pagu anggaran sebesar Rp10.200.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 20% atau sama dengan Rp2.031.016.908.



Ket : Bimtek Pengisian Capaian Output di KPPN Jaksix



Ket : Open Clinic Pemutakhiran Halaman III DIPA

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5

Indikator Kinerja 6.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

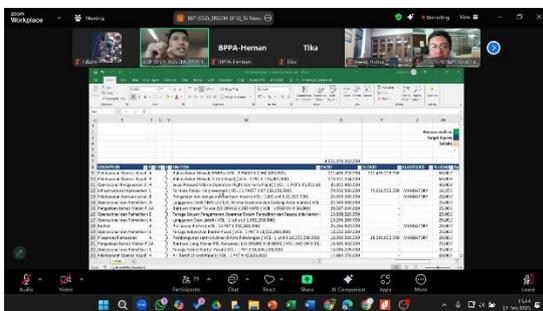
Capaian IK 6 Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur diakhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain;

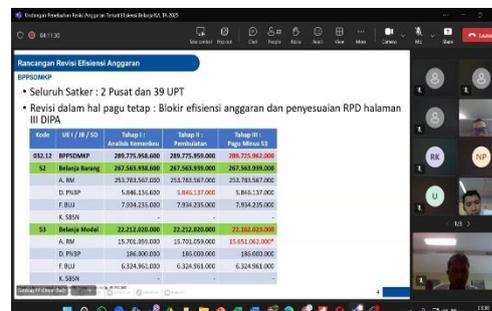
1. Proses pembuatan modul Dashboard Anggaran sesuai dengan proses bisnis Keuangan Tahun 2025;

2. Updating data pada matriks Revisi Renja 2025 terkait efisiensi anggaran;
3. Membuat matriks usulan jika terjadi penambahan alokasi efisiensi anggaran;
4. Melakukan pembuatan rencana kegiatan Bidang Perencanaan;
5. Melakukan konsultasi dengan pengelola anggaran BPPSDM KP terkait fitur backup ADK pada aplikasi SAKTI;
6. Pembahasan revisi DIPA ke-2 terkait efisiensi anggaran;
7. Melakukan penelusuran DIPA Revisi 2 dan RKAKL pada aplikasi Satu DJA dan membaginya dengan PPK dan Plt. Kasubbag Umum;
8. Menghadiri pertemuan penelaahan revisi efisiensi oleh DJA secara daring.
9. Menghadiri pertemuan terkait efisiensi anggaran secara daring dengan BPPSDM KP terkait update ketentuan efisiensi anggaran.
10. Menghadiri pertemuan dengan BPPSDM KP terkait pembahasan anggaran pasca revisi efisiensi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perencanaan dan Penganggaran” dengan pagu anggaran sebesar Rp60.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 3,69% atau sama dengan Rp2.212.000.



Ket : pertemuan terkait efisiensi anggaran secara daring



Ket : Rapat penelaahan revisi efisiensi oleh DJA secara daring

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6

Indikator Kinerja 7.

Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) merupakan penilaian Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan

kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Capaian IK 7 Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur diakhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain;

1. Penyusunan laporan kinerja tahun 2024;
2. Reviu laporan kinerja tahun 2024 serta tindaklanjut hasil reviu LKJ BBRSEKP 2024;
3. Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 meliputi, PK, Manual IKU, Rencana Aksi, Rincian Target IK;
4. Uploading dokumen pendukung penialian sakip kedalam aplikasi esr panrb;
5. Verifikasi dan validasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025;
6. Penyusunan laporan kinerja triwulan I tahun 2025;
7. Penyusunan evaluasi rencana aksi triwulan I 2025;
8. Finalisasi Pengisian SKP tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025;
9. Unggah data dukung capaian kinerja kedalam pintasan data dukung BBRSEKP;

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Pemantauan dan Evaluasi” dengan pagu anggaran sebesar Rp60.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 4,10% atau sama dengan Rp2.460.000.



Ket : Diskusi pembahasan pembahasan Manual IK



Ket : Verifikasi dan validasi capaian kinerja tahun 2024

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7

Indikator Kinerja 8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. Bagi Satker yang tidak diuji petik Pengawasan oleh Itjen, maka nilai capaian Satker yang diperoleh maksimal sebesar 85 (sesuai target) dengan persentase capaian sebesar 100%.

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK-17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)										
Realisasi Tahunan				2025					Rencana Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2022-2024	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100.00	100.00	75.00	71,43	85	85	85	100.00	13,57	85	100
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2024-2025	Rencana Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
100.00	120	120.00	87,11	100	100		12.89	100	100	

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yang telah di tetapkan pada rencana aksi, dengan target 85 dan capaian 85 atau sama dengan 100%. Capaian sesuai dengan surat Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: B. 3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP”

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2024 terjadi kenaikan capaian sebesar 13,57%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini cukup stabil, jika dibandingkan dengan target kinerja kegiatan tahun 2025 capaian sudah mencapai target atau sama dengan 100%.

Gambar 14. Data Rekapitulasi Capaian IK 8 sesuai surat BPPSDMKP Nomor B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025

Lampiran Surat
 Nomor : B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025
 Tanggal : 14 April 2025

**Data Rekapitulasi Capaian IKU
 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM
 Triwulan I Tahun 2025**

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BPPSDM KP	32	31	96,88
2	Pusdik KP	0	0	0
3	PuslatKP	0	0	0
4	Pusluh KP	4	4	100
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0

Sumber Data: Surat BPPSDMKP

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian IK 8 K/L BBRSEKP Dengan BBRP2BKP

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	85	85	100
BBRP2BKP	85	85	100

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain telah selesainya tidak ditemukannya hasil temuan pada BBRSEKP.

Kegiatan pendukung IK ini antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan Koordinator Keuangan di BPPSDMKP, serta adanya rapat dan pengawasan internal di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial "Layanan Manajemen Keuangan" dengan pagu anggaran sebesar Rp60.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 9,11% atau sama dengan Rp5.468.500.



Ket : Rapat internal pembahasan progress kegiatan



Ket : Rapat persiapan pemeriksaan laporan keuangan

Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8

Indikator Kinerja 9

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)

IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) merupakan:

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)
- Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya.

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) pada triwulan I tahun 2025 mencapai 100% dari target 80 atau sama dengan 120%.

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian IK 9 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)

IK-18. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBMyang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)										
Realisasi Tahunan				2025					Rencana Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2021-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	80	100	120.00	-	80	100
Persentase Capaian Tahunan				Persentase Capaian				Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2024-2025	Rencana Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	-	-	100	120		-	100	100	

Capaian IK pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 80 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan nota dinas Sekretariat Jenderal KKP nomor: 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025.

Indikator ini, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya maka capaian ik tidak dapat dibandingkan karena merupakan IK baru yang dibentuk di tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

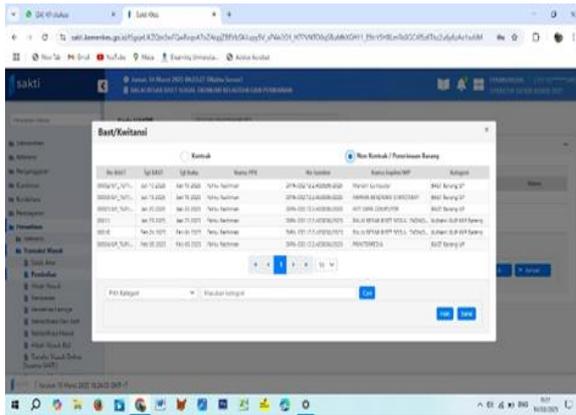
Tabel 12. Perbandingan Capaian IK 9 K/L BBRSEKP Dengan BBRP2BKP

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	80	100	120
BBRP2BKP	80	100	120

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain terselesaikannya identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang telah disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta tersusunnya revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain koordinasi dengan Set. BPPSDMKP, adanya rapat dan koordinasi dengan tim sekretariat BPPSDMKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Umum” dengan pagu anggaran sebesar Rp95.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 7,73% atau sama dengan Rp7.339.018.



Ket : Data persediaan barang dan jasa pada aplikasi SIRUP



Ket : Melakukan Inventarisasi BMN BBRSEKP

Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9

Indikatorl Kinerja 10.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)

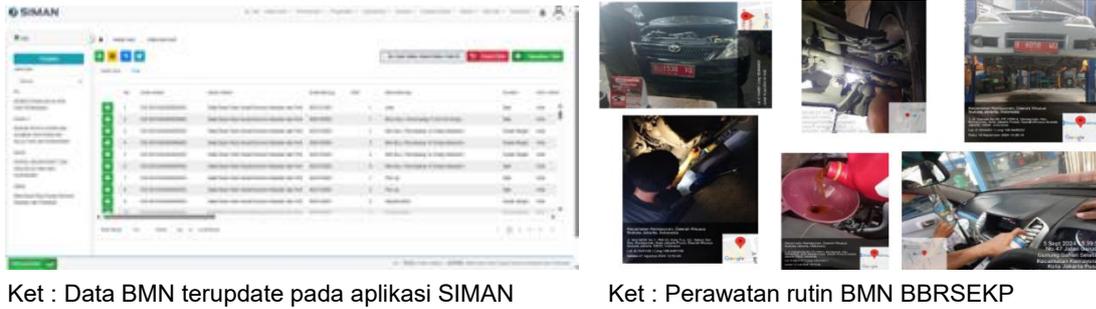
IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%) merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IK 9 Pada triwulan I Tahun 2025 belum terdapat capaian atau belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur diakhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain;

1. Membuat daftar rekap BMN BBRSEKP Peralatan dan Mesin non TIK Tahun 2025;
2. Melakukan inventarisasi BMN BBRSEKP;
3. Melakukan Pencatatan Perubahan Kondisi pada Matriks BMN;
4. Melakukan inventarisasi BMN BBRSEKP
5. Koordinasi dengan Kasubbag umum dan petugas pengurus kendaraan operasional kantor terkait SK Kendaraan Dinas pasca dilantik Kepala Balai BBRSEKP yang baru
6. Koordinasi terkait pengecekan kondisi BMN berupa 2 notebook Asus

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui dua kegiatan Manajerial “Layanan BMN dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan” dengan total pagu anggaran sebesar Rp20.000.000 dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran oleh kementerian keuangan sehingga realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 11,99% atau sama dengan Rp2.398.000.



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 10

3.3 Realisasi Keuangan BBRSEKP Triwulan I Tahun 2025

Penyerapan Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Keluatan dan Perikanan secara umum berhasil mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Anggaran BBRSEKP pada triwulan I tahun 2025 disusun berdasarkan variable jenis pengeluaran dan variable kegiatan. Variabe pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan variable kegiatan adalah kegiatan dukungan manajemen.

Pagu anggaran BBRSEKP dalam DIPA TA. 2025 adalah Rp10.763.682.000 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp10.200.000.000 dan Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp.563.682.000,-. dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp2.060.989.758 atau sama dengan 19,14%.

Tabel 13. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja TW I Tahun 2025

JENIS BELAJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	Rp10.200.000.000	Rp2.031.016.908	19.91%
Belanja Barang	Rp563.682.000	Rp59.970.850	10.63%
TOTAL	Rp10.763.682.000	Rp2.060.989.758	19.14%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 14. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp.000)	REALISASI (Rp.000)	%
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	76.000	-	-
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	37.682	-	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10.650.000	2.060.989	19,14

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 15. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK TW I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	76.000.000	-	-
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2 Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	37.682.000	-	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3 Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	70.000.000	6.790.000	9.70
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85.000.000	3.305.000	3.89
		5 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	10.200.000.000	2.031.016.908	19.91
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	60.000.000	2.212.000	3,69

		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	60.000.000	2.460.000	4.10
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	60.000.000	5.468.000	9.11
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	95.000.000	7.339.000	7.73
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	20.000.000	2.398.000	11.99
Total Realisasi Anggaran Tahun 2024				10.763.682.000	2.060.989.758	19.14
						%

Sumber : Aplikasi Omspan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP

A. Efisiensi Anggaran

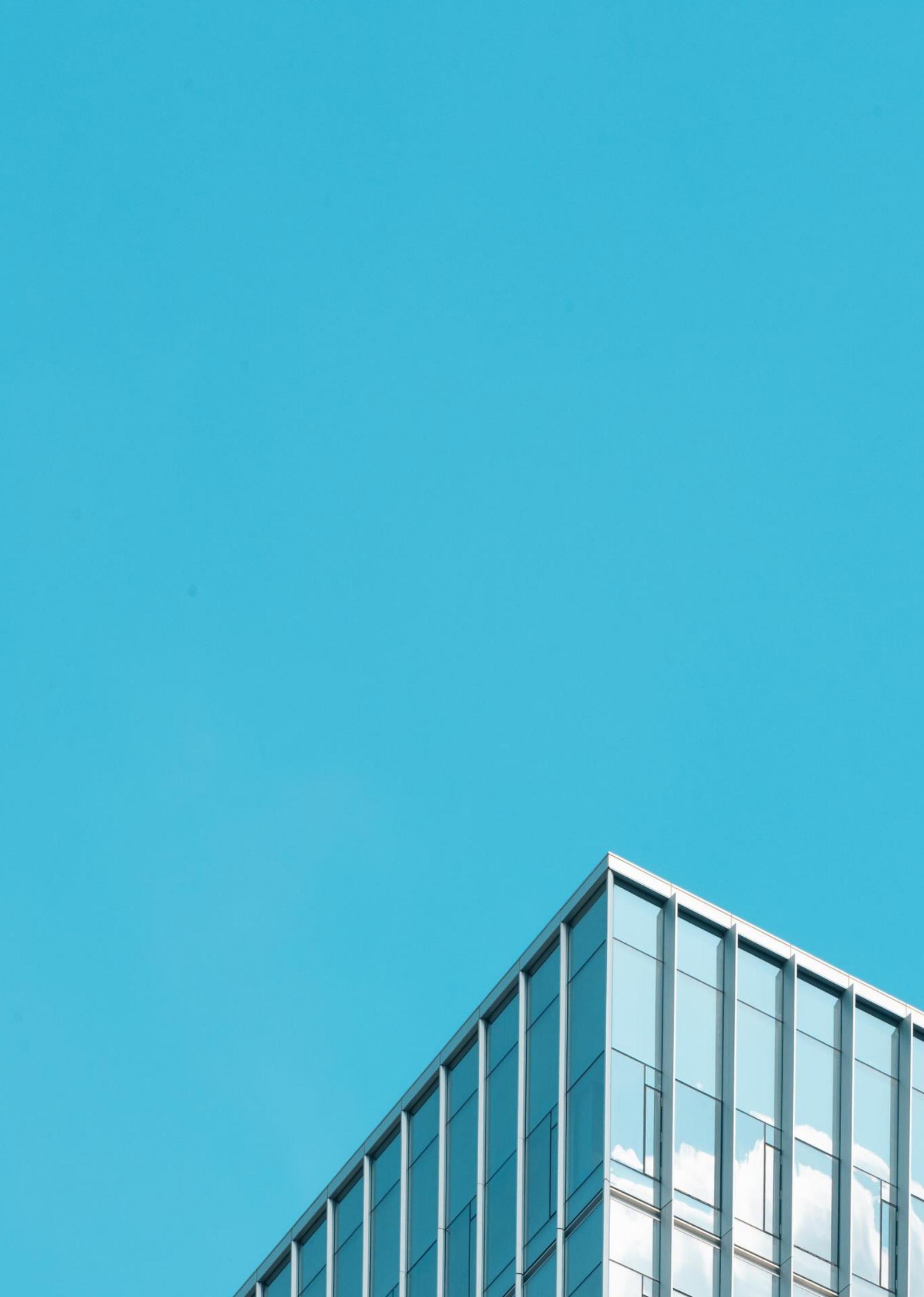
BBRSEKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Diktum 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran mengamanatkan pelaksanaan *assessment RO*, yaitu: *“Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi pra-pelaporan”*

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian

keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Secara efisiensi, sampai dengan triwulan I belum tergambar capaian atas efisiensi dikarenakan perhitungan efisiensi baru dapat diukur akhir tahun.

Pencapaian nilai efisiensi dengan rentang -20 atau +20 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dinilai cukup efisien dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan di triwulan berikut



BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi



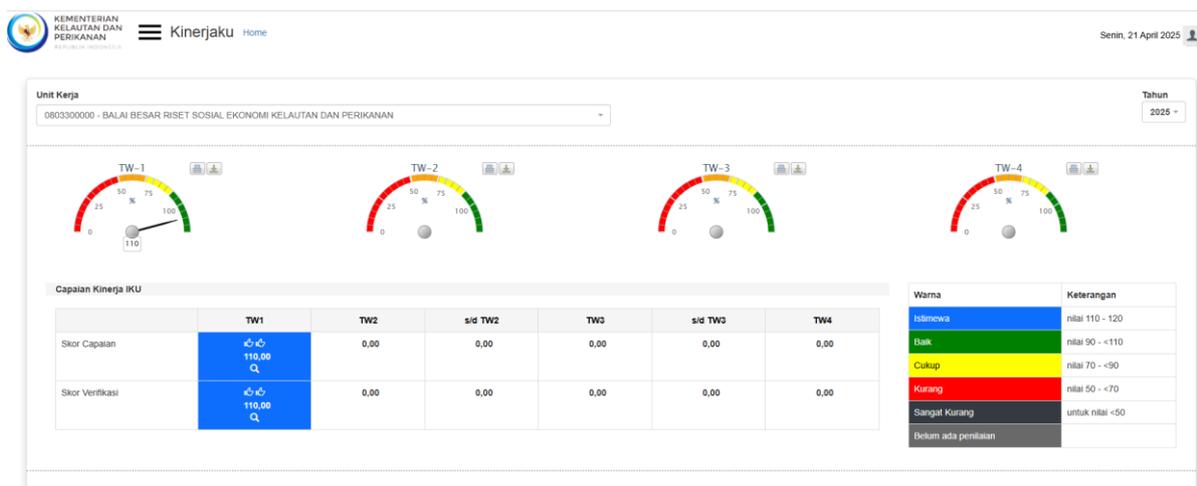
BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing – masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP di tingkat satker pada triwulan I tahun 2025 sebesar **110,00%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 18 . Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP TW I Tahun 2025



Selama triwulan I tahun 2025 dari 10 IK BBRSEKP, terdapat 1 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 1 IK berstatus baik (hijau). Rincian target dan realisasi 2 IK tersebut adalah:

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 85% atau sama dengan 100%;
4. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%

Tabel 16. Rincian Target Dan Realisasi Atas 10 IK TW I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2	-	-
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2 Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1	-	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	3 Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76	-	-
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	-	-
		5 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	-	-
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50	-	-
		7 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82	-	-
		8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100
		9 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120
10 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	-	-		

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja triwulan I tahun 2025, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama triwulan I tahun 2025 sebesar Rp2.060.989.758 relatif rendah dari pagu anggaran Rp10.763.682.000 hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran serta blokir dja. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 19.15% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari tiga SK tercapai melebihi target atau **"ISTIMEWA"**, yaitu SK "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker" dengan persentase capaian 110%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal -hal sebagai berikut :

2. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Yang Baik

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

3. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu melalui verifikasi dan validasi capaian kinerja dengan tim penilai BPPSDMKP.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi K**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	113.682.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.650.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		10.763.682.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Perjanjian Kinerja (Rev 1)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novi Susetyo Adi**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


Novi Susetyo Adi

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BPPSDMKP	
Katimja BBRSEKP	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	113.682.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.650.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		10.763.682.000

Jakarta, 17 April 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


Novi Susetyo Adi

R
/

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BPPSDMKP	y
Katimja BBRSEKP	f



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2025